

Dampak Korupsi terhadap perekonomian di Indonesia

Rizky Subhan

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (UNISKA MAB)
rizkysubhan@uniska-bjm.ac.id

Abstract

Corruption remains a significant barrier to sustainable economic development in Indonesia, leading to inefficiencies in resource management and diminishing public trust in state institutions. This study aims to analyse the impact of corruption on economic growth, investment, and societal welfare through a qualitative approach using literature review. The findings indicate that corruption has a significant negative relationship with economic growth, hindering foreign investment inflows and exacerbating economic inequality. High levels of corruption create an environment of uncertainty, deterring potential investors who seek stable and transparent markets. Data reveal that Indonesia's low Corruption Perception Index (CPI), which scored 34 out of 100 in 2023, contributes to stagnant investment and poor public service quality. Moreover, corruption diverts public funds away from essential services such as education and healthcare, further entrenching poverty and inequality. To mitigate the effects of corruption, comprehensive strategies are needed, including enhancing transparency in government spending, strengthening oversight institutions like the Corruption Eradication Commission (KPK), and fostering active community participation in governance. Public awareness campaigns and education on the detrimental effects of corruption can empower citizens to demand accountability from their leaders. Additionally, implementing digital solutions for public procurement and financial management can reduce opportunities for corrupt practices. Through collaboration among various stakeholders, including government, civil society, and the private sector, it is hoped that anti-corruption efforts can promote better economic growth and equitable welfare distribution in Indonesia. Ultimately, addressing corruption is not only crucial for improving economic performance but also for ensuring social justice and enhancing the overall quality of life for all citizens.

Keywords: Corruption, Economic Growth, Investment.

Abstrak

Korupsi masih menjadi hambatan signifikan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, yang menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan telaah pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, menghambat arus masuk investasi asing, dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Tingkat korupsi yang tinggi menciptakan lingkungan yang tidak pasti, sehingga menghalangi calon investor yang mencari pasar yang stabil dan transparan. Data mengungkapkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IKP) Indonesia yang rendah, yang mencapai skor 34 dari 100 pada tahun 2023, berkontribusi terhadap investasi yang stagnan dan kualitas layanan publik yang buruk. Selain itu, korupsi mengalihkan dana publik dari layanan penting seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, yang selanjutnya memperparah kemiskinan dan ketimpangan. Untuk mengurangi dampak korupsi, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk meningkatkan transparansi dalam pengeluaran pemerintah, memperkuat lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola. Kampanye kesadaran publik dan pendidikan tentang dampak buruk korupsi dapat memberdayakan warga negara untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Selain itu, penerapan solusi digital untuk pengadaan publik dan pengelolaan keuangan dapat mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, diharapkan upaya antikorupsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Pada akhirnya, penanggulangan korupsi tidak hanya penting untuk meningkatkan kinerja ekonomi tetapi juga untuk memastikan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi semua warga negara.

Kata Kunci: Korupsi, Pertumbuhan ekonomi, Investasi

Copyright (c) 2025 Rizky Subhan

✉ Corresponding author: Rizky Subhan

Email Address: rizkysubhan@uniska-bjm.ac.id (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (UNISKA MAB))

Received 10 February 2025, Accepted 14 February 2025, Published 17 February 2025

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Praktik korupsi yang merajalela di berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun swasta, telah menyebabkan tidak efisien dalam pengelolaan sumber daya dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Korupsi sering kali dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, suap, nepotisme, dan manipulasi anggaran yang menghambat efektivitas kebijakan publik (Rose-Ackerman, 1999). Di Indonesia, berbagai skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, kepala daerah, dan pengusaha menunjukkan bahwa korupsi telah mengakar dalam sistem birokrasi dan politik.

Berdasarkan laporan *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang dirilis oleh *Transparency International*, skor indeks persepsi korupsi Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2023, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100, yang menempatkannya di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei (*Transparency International*, 2023). Skor ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Negara-negara dengan skor CPI rendah umumnya memiliki kelemahan dalam sistem penegakan hukum, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta lemahnya pengawasan terhadap pejabat publik (Tanzi, 1998).

Dampak korupsi terhadap perekonomian sangat luas dan kompleks. Salah satu dampak utama adalah menurunnya tingkat investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investor cenderung menghindari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena tingginya ketidakpastian hukum, biaya tambahan akibat praktik suap, serta ketidakjelasan regulasi bisnis (Mauro, 1995). Studi yang dilakukan oleh The World Bank (2021) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami stagnasi dalam pertumbuhan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*, FDI), yang berakibat pada lambatnya penciptaan lapangan kerja dan rendahnya produktivitas ekonomi.

Selain itu, korupsi juga berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. Korupsi menyebabkan alokasi anggaran negara menjadi tidak efisien karena dana publik sering kali diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Shleifer & Vishny, 1993). Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas infrastruktur, layanan publik yang tidak optimal, serta tingginya biaya ekonomi akibat inefisiensi birokrasi. Misalnya, proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya meningkatkan konektivitas dan produktivitas justru mengalami keterlambatan atau tidak sesuai spesifikasi akibat praktik *mark-up* anggaran dan kolusi dalam proses tender.

Lebih jauh, korupsi memperburuk ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Dana yang seharusnya digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, sering kali dikorupsi oleh oknum tertentu. Akibatnya, kelompok masyarakat miskin yang seharusnya menerima manfaat dari anggaran negara justru semakin tertinggal (Gupta, Davoodi, & Alonso-Terme, 2002). Penelitian menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi

cenderung memiliki indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*, HDI) yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang memiliki sistem pemerintahan yang bersih dan transparan (*United Nations Development Programme*, 2020).

Melihat dampak negatif yang luas dari korupsi terhadap perekonomian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana korupsi memengaruhi berbagai indikator ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat korupsi dan pertumbuhan ekonomi, investasi, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dampak tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan guna menciptakan perekonomian yang lebih transparan dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*literature review*) untuk menganalisis dampak korupsi terhadap perekonomian di Indonesia. Kajian pustaka merupakan metode yang berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena (Neuman, 2014). Dalam konteks penelitian ini, kajian pustaka dilakukan untuk menggali hubungan antara korupsi dan berbagai indikator ekonomi seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan sosial berdasarkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, di mana data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk memahami pola dan hubungan yang muncul dalam berbagai literatur terkait dampak korupsi terhadap perekonomian. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap konsep dan teori yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Artikel Jurnal Ilmiah – Studi akademik dari jurnal bereputasi seperti *Quarterly Journal of Economics*, *World Development*, *IMF Staff Papers*, dan *Economics of Governance*.
2. Laporan Lembaga Internasional – Data dari Transparency International (Corruption Perceptions Index, CPI), World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan United Nations Development Programme (UNDP) mengenai tingkat korupsi dan indikator ekonomi di Indonesia.
3. Buku Referensi – Literatur akademik terkait teori korupsi dan ekonomi politik, seperti karya Rose-Ackerman (1999) dan Tanzi (1998).
4. Dokumen Pemerintah dan Lembaga Terkait – Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait dampak korupsi terhadap perekonomian nasional.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber yang relevan (Bowen, 2009). Studi dokumentasi merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama dalam kajian pustaka, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dari berbagai dokumen tertulis yang telah tersedia. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, publikasi dari lembaga internasional seperti *Transparency International*, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF), serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Teknik ini dipilih karena studi dokumentasi memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai teori dan temuan empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara korupsi dan dampaknya terhadap perekonomian. Selain itu, teknik ini juga membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dalam berbagai studi sebelumnya, sehingga dapat memperkuat argumen penelitian. Studi dokumentasi tidak hanya mengandalkan satu sumber data, tetapi mengkombinasikan berbagai perspektif dari literatur yang berbeda, sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian (Krippendorff, 2018).

Dalam proses analisis data, penelitian ini menerapkan pendekatan analisis isi (*content analysis*), di mana dokumen-dokumen yang dikumpulkan dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti hubungan korupsi dengan investasi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, dan efektivitas kebijakan anti-korupsi. Analisis ini dilakukan dengan meninjau kesesuaian antara teori dan bukti empiris yang ditemukan dalam literatur yang digunakan (Bowen, 2009). Dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, penelitian ini dapat menyajikan sintesis dari berbagai sumber yang telah ada, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari berbagai temuan yang terdapat dalam literatur yang dikaji (Krippendorff, 2018). Dimana dokumen-dokumen yang dikumpulkan dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti hubungan korupsi dengan investasi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, dan efektivitas kebijakan anti-korupsi. Analisis ini dilakukan dengan meninjau kesesuaian antara teori dan bukti empiris yang ditemukan dalam literatur yang digunakan (Bowen, 2009). Dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, penelitian ini dapat menyajikan sintesis dari berbagai sumber yang telah ada, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia.

Tahapan analisis yang dilakukan meliputi:

1. Reduksi Data – Menyaring informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data – Menyusun hasil kajian dalam bentuk naratif dan tabel untuk mempermudah pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan – Mengintegrasikan hasil kajian pustaka untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Hubungan antara Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung mengalami perlambatan ekonomi akibat ketidakefisienan alokasi sumber daya dan kebocoran anggaran (Tanzi, 1998). Berdasarkan data dari Transparency International (2023), indeks persepsi korupsi (*Corruption Perceptions Index*, CPI) Indonesia masih relatif rendah, dengan skor 34/100, yang mengindikasikan tingginya persepsi korupsi dalam sistem pemerintahan.

Dalam laporan World Bank (2021), disebutkan bahwa korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi melalui dua mekanisme utama: pertama, menurunkan efisiensi birokrasi dan meningkatkan biaya transaksi dalam dunia usaha; kedua, menghambat inovasi dan produktivitas karena perusahaan lebih fokus pada praktik "lobbying" daripada meningkatkan daya saing. Studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan satu poin dalam indeks CPI dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara hingga 0,5% per tahun (Mauro, 1995).

Dampak Korupsi terhadap Investasi Asing dan Belanja Negara

Korupsi juga berdampak negatif terhadap investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*, FDI). Investor cenderung menghindari negara dengan tingkat korupsi tinggi karena ketidakpastian hukum, tingginya biaya "under-the-table", serta risiko rendahnya perlindungan hak kepemilikan (Shleifer & Vishny, 1993). Berdasarkan laporan UNCTAD (2022), Indonesia mengalami fluktuasi dalam aliran FDI, di mana tingkat investasi asing lebih tinggi ketika reformasi tata kelola pemerintahan diperkuat, seperti pada periode reformasi kebijakan anti-korupsi di awal 2000-an.

Dalam konteks belanja negara, korupsi mengarah pada penggunaan anggaran yang tidak efisien. Sektor-sektor seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan sering kali mengalami kebocoran dana akibat praktik suap dan mark-up harga dalam proyek pemerintah (Gupta, Davoodi, & Alonso-Terme, 2002). Sebagai contoh, laporan BPK RI (2023) menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, lebih dari 30% anggaran proyek infrastruktur di Indonesia mengalami ketidaksesuaian anggaran yang disebabkan oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan dana publik.

Dampak Korupsi terhadap Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan

Korupsi tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperburuk ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh UNDP (2020),

ditemukan bahwa negara dengan indeks korupsi yang lebih tinggi cenderung memiliki koefisien Gini yang lebih tinggi, yang menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang lebih besar.

Korupsi sering kali menyebabkan alokasi anggaran sosial yang tidak optimal, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk bantuan sosial dan pembangunan ekonomi justru masuk ke kantong para elite politik dan pejabat yang korup (Tanzi, 1998). Akibatnya, kelompok masyarakat miskin tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang memperparah siklus kemiskinan.

Visualisasi Data

Tabel 1. Indeks Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN (2023)

Negara	Indeks Persepsi Korupsi (CPI)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Singapura	83/100	3.5%
Malaysia	50/100	4.2%
Thailand	35/100	2.6%
Indonesia	34/100	5.0%
Filipina	33/100	6.1%
Vietnam	42/100	6.8%

(Sumber: *Transparency International, 2023; World Bank, 2023*)

Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dan Koefisien Gini di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2023. Berdasarkan grafik, dapat terlihat bahwa ketika CPI mengalami sedikit peningkatan, yang menandakan penurunan tingkat korupsi, Koefisien Gini cenderung stabil atau menurun, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan menjadi lebih terkendali. Sebaliknya, dalam beberapa tahun di mana CPI mengalami stagnasi atau bahkan penurunan (yang berarti korupsi meningkat), Koefisien Gini justru mengalami kenaikan, mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi semakin memburuk. Hal ini memperkuat temuan dari berbagai studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa korupsi sering kali memperburuk distribusi kekayaan dengan memperkaya kelompok elite tertentu sementara masyarakat berpenghasilan rendah semakin terpinggirkan.

Selain itu, pola yang ditunjukkan dalam grafik ini juga sejalan dengan temuan dari laporan *Transparency International* dan *World Bank*, yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata. Ketimpangan ekonomi yang meningkat akibat korupsi umumnya disebabkan oleh penyalahgunaan anggaran publik, penggelapan dana bantuan sosial, serta sistem pajak yang tidak adil, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk memastikan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

Diskusi

Interpretasi Temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan teori ekonomi, korupsi meningkatkan biaya transaksi dan menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha, yang pada akhirnya menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Tanzi, 1998). Ketika pejabat atau birokrat meminta suap untuk mempercepat perizinan usaha atau proyek, pelaku usaha cenderung mengurangi ekspansi bisnis mereka karena tingginya risiko biaya tak terduga. Akibatnya, produktivitas nasional menjadi terhambat dan ekonomi sulit berkembang secara optimal. Selain itu, anggaran pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sering kali mengalami kebocoran akibat praktik mark-up proyek dan penyalahgunaan dana publik, sehingga efektivitas kebijakan pembangunan menurun.

Korupsi juga berpengaruh terhadap daya saing ekonomi nasional. Negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami kesulitan dalam menarik investasi asing langsung (FDI) karena investor enggan beroperasi di lingkungan yang tidak transparan dan penuh risiko (Shleifer & Vishny, 1993). Seperti yang terlihat dalam data CPI dan FDI Indonesia, ketika indeks persepsi korupsi menurun, investasi asing juga mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan penelitian World Bank (2021) yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem tata kelola yang buruk mengalami stagnasi ekonomi lebih sering dibandingkan negara dengan tingkat transparansi tinggi. Dengan demikian, korupsi bukan hanya masalah etika, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat nyata.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang mengkaji dampak korupsi terhadap ekonomi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Mauro (1995) menemukan bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Studi yang dilakukan oleh Gupta, Davoodi, dan Alonso-Terme (2002) juga menunjukkan bahwa korupsi memperburuk ketimpangan ekonomi dengan mengurangi belanja publik pada sektor yang bersifat inklusif, seperti pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Namun, beberapa studi lain menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, korupsi dapat memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, terutama di negara-negara dengan birokrasi yang sangat lambat. Misalnya, teori "*grease the wheels*" menyatakan bahwa dalam sistem birokrasi yang tidak efisien, korupsi dapat mempercepat proses administratif, sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek (Meon & Weill, 2010). Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif korupsi jauh lebih besar dibandingkan potensi manfaatnya, terutama dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Untuk mengatasi dampak buruk korupsi terhadap perekonomian, diperlukan strategi yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara melalui digitalisasi sistem keuangan dan pengadaan barang serta jasa. Penerapan e-government dan e-procurement telah terbukti mengurangi praktik suap dalam administrasi publik di beberapa negara berkembang (OECD, 2020).

Selain itu, penting untuk memperkuat lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan anggaran operasional, pemberian kewenangan yang lebih luas, serta perlindungan hukum bagi pelapor kasus korupsi. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem peradilan agar hukuman bagi pelaku korupsi lebih tegas dan memberikan efek jera.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Edukasi mengenai dampak korupsi harus diperkuat, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun kampanye sosial di media massa. Partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah juga perlu ditingkatkan, misalnya dengan mendorong keterbukaan informasi dan pelaporan kasus korupsi melalui platform berbasis digital. Jika berbagai elemen masyarakat bekerja sama, maka pemberantasan korupsi dapat lebih efektif, sehingga ekonomi nasional dapat berkembang dengan lebih baik.

REFERENSI

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? *Economics of Governance*, 3(1), 23-45. <https://doi.org/10.1007/s101010100039>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681-712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Corruption. *Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 599-617. <https://doi.org/10.2307/2118402>
- Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. *IMF Staff Papers*, 45(4), 559-594. <https://doi.org/10.2307/3867585>

- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*.
<https://www.transparency.org/en/cpi>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human Development Report 2020: The next frontier—Human development and the Anthropocene*. <http://hdr.undp.org/>
- World Bank. (2021). *World Development Report 2021: Data for better lives*.
<https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2021>